

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN DALAM KONDISI VUCA

Misnar Sitiriwanti¹, Tarma Sartima², Khairul³, Fadhlhan⁴,
Yahya Krisnawansyah⁵, Andrianti⁶

Ilmu Administrasi Negara STIA Bina Nusantara Mandiri Pariaman, ²Prodi Ilmu
Administrasi Negara FISIPOL Universitas Ekasakti, ³Program studi Administrasi
Negara STIA Adabiah, ⁴Program studi Ilmu Administrasi Negara STIA Adabiah,
⁵Program studi Ilmu Administrasi Negara STIA Adabiah, ⁶Program Studi Ilmu
Administrasi Negara STIA Bina Nusantara Mandiri Pariaman

¹sitiriwanti@gmail.com, ²tarmasartima@ymail.com, ³65khairul65@gmail.com,
⁴fadhlhanrafles46@gmail.com, ⁵yahyaceryl@gmail.com,
⁶riantiad38@gmail.com

ABSTRAK

Sektor pendidikan merupakan salah satu sektor terdampak dalam bencana non-alam pandemi Covid-19. Pada saat itu terjadi perubahan besar dalam kebijakan pendidikan, dari kebiasaan pembelajaran tatap muka, berubah drastis menjadi pembelajaran *online* yang bersifat jarak jauh. Aktor-aktor penyelenggara kebijakan pendidikan mengalami berbagai tahapan kebijakan dan tidak menutup kemungkinan terjadi bongkar pasang kebijakan. Interaksi aktor yang biasanya hanya melibatkan Dinas Pendidikan dan sekolah, menjadi bertambah dengan keterlibatan orang tua di rumah. Sehingga jaringan aktor semakin meluas dari arena kebijakan publik biasanya. Penelitian ini bertujuan menjelaskan berbagai faktor penyebab keberhasilan kebijakan pendidikan di masa pandemi Covid – 19 di Kabupaten Agam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan sumber data wawancara dan studi dokumentasi cacatan harian Covid -19 dalam <https://amcnews.co.id/>. Hasil dari penelitian ditemukan bahwa keberhasilan kebijakan pendidikan di masa pandemi Covid-19 dipengaruhi 4 faktor menurut George Edward III yaitu: a) komunikasi kebijakan yang tertransmisi dengan cepat dan tepat. Pesan kebijakan sesama implementor cepat tersampaikan melalui berbagai sarana komunikasi *online* dan tatap muka terbatas; b) Sumberdaya kebijakan anggaran APBD dan sarana dan prasarana tersedia disesuaikan kebutuhan protokol kesehatan. Khusus untuk sumberdaya manusia Tim Satgas GTP2 Covid – 19 Kabupaten Agam yang saling berinteraksi, c) Sikap demokratis dan keterbukaan sesama implementor disertai perilaku kooperatif antar aktor pelaksana, dan d) Struktur serta fragmentasi kebijakan antar aktor dan lembaga sangat kuat. Kebijakan pendidikan yang diberlakukan memiliki Standar Operasional Prosedur yang harus mengatur cara bertindak implementor. Keberhasilan juga ditunjang oleh koordinasi dan intensitas interaksi antar lembaga, sekolah, kelompok masyarakat, dan orang tua di rumah.

Kata Kunci : Pendidikan, Pandemi, VUCA, dan Implementasi Kebijakan

ABSTRACT

The education sector was among the sectors most affected by the non-natural disaster of the COVID-19 pandemic. During this period, educational policies underwent a major transformation, shifting from conventional face-to-face instruction to fully online distance learning. Policymakers and education stakeholders experienced multiple stages of policy implementation, often accompanied by policy adjustments and revisions. Interactions among stakeholders, which had previously involved primarily the Education Office and schools, expanded to include parents as active participants in supporting learning at home. Consequently, the policy network became broader than that typically observed in public policy implementation. This study aims to explain the factors contributing to the successful implementation of education policy during the COVID-19 pandemic in Agam Regency. A qualitative approach was employed using data collected through interviews and document analysis, including the COVID-19 daily records published on the Agam Media Center website. The findings reveal that the successful implementation of education policy during the COVID-19 pandemic was influenced by four factors proposed by George Edward III: (1) effective policy communication, characterized by the rapid and accurate transmission of policy information among implementers through online communication platforms and limited face-to-face meetings; (2) adequate policy resources, including regional government budget allocations (APBD), facilities, and infrastructure adapted to health protocols, as well as coordinated human resources through the Agam Regency COVID-19 Task Force; (3) democratic attitudes, openness, and cooperative behavior among implementing actors; and (4) a well-defined bureaucratic structure and strong interagency coordination supported by clear Standard Operating Procedures (SOPs). The success of policy implementation was further strengthened by intensive coordination and interaction among government agencies, schools, community groups, and parents in supporting students' learning at home.

Keywords: Education; COVID-19 Pandemic; VUCA; Policy Implementation.

A. Pendahuluan

Sektor pendidikan merupakan sektor yang sangat vital dalam kehidupan masyarakat dalam membangun sumber daya manusia yang handal dan berkualitas. Pola pendidikan yang biasanya dilakukan jadi terhambat sa

at pandemi Covid – 19 terjadi. Kebijakan utama pemerintah fokus pada keselamatan peserta didik dan penghapusan ujian nasional, serta memberikan kewenangan kepada lembaga pendidikan untuk mengatur

model pembelajaran selama pandemi (Nurkamiden, 2021).

Pandemi Covid – 19 memaksa pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan darurat di sektor pendidikan, khususnya pembelajaran jarak jauh (PJJ), yang menghadapi tantangan seperti keterbatasan infrastruktur dan kesenjangan digital pada peserta didik (Muddin et al., 2025).

Akibat dari kebijakan ini pihak pemerintah melakukan berbagai inovasi berupa kegiatan sosialisasi dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, peningkatan kapasitas pengajar, dan penggunaan berbagai pelayanan digital yang dilakukan oleh Kabupaten Agam.

Kepemimpinan *Agile* merupakan suatu respons strategis menghadapi tantangan VUCA di era digital yang menuntut organisasi untuk beradaptasi cepat dan mengambil keputusan fleksibel. Pendekatan ini fokus pada adaptabilitas, kolaborasi, inovasi, dan keberanian bereksperimen sesuai prinsip "*fail fast, learn fast*". (Maulidiyah et al., 2025).

Konsep VUCA menuntut pembuat kebijakan mengadopsi pendekatan adaptif, inklusif, dan proaktif dengan kualitas kepemimpinan yang mampu beradaptasi dan memiliki

ketahanan menghadapi berbagai tantangan teknologi, globalisasi, dan kompleksitas. Strategi adaptasi mencakup: a) Kemampuan dan ketahanan kepemimpinan untuk bertahan dan beradaptasi terhadap perubahan dan tantangan di era VUCA. b) Kolaborasi dan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan untuk mengoptimalkan keahlian dan wawasan kolektif. c) Inovasi dalam desain kebijakan yang fleksibel dan responsif terhadap perubahan teknologi dan global (Ra'is, 2025).

Peran orang tua, pendidik, dan pemerintah sangat penting dalam mendukung perkembangan peserta didik selama pandemi serta perlunya strategi berkelanjutan menghadapi tantangan serupa (Alvin Habibi et al., 2025)

Hasil menunjukkan peralihan dari pembelajaran tatap muka ke daring mempengaruhi interaksi guru-siswa, akses pendidikan, dan kesenjangan digital. Kombinasi pembelajaran daring dan luring (*blended learning*) diidentifikasi sebagai strategi paling efektif, dengan pengembangan infrastruktur digital (Prayogi et al, 2025).

Teori dan proses kebijakan publik memiliki definisi yang tidak hanya

a menekankan pada hal-hal yang diusulkan pemerintah, tetapi juga mencakup arah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah (Anggara, 2018). Menurut (D. K. et al Djaja, 2025) ciri-ciri kebijakan publik yang efektif antara lain adalah memiliki tujuan yang jelas, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, dan dapat diimplementasikan dengan realistis. Hal ini menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan publik tidak hanya diukur dari proses pembuatannya, tetapi juga dari bagaimana kebijakan tersebut dapat diimplementasikan dan memberikan dampak positif yang nyata.

Implementasi kebijakan dapat ditentukan oleh beberapa faktor, antara lain :

1. Tujuan yang ingin dicapai atau alasan yang dipakai untuk mengadakan kebijakan itu yaitu rasionalitas dan keinginan yang harus dicapai.
2. Asumsi yang dipakai dalam proses perumusan kebijakan itu realistis
3. Informasi yang digunakan cukup lengkap dan benar (Abidin, 2019).

Proses pengimplementasian suatu kebijakan dipengaruhi oleh dua unsur yaitu: adanya program (kebijaksanaan) yang dilaksanakan, adanya

target group yaitu kelompok masyarakat menjadi sasaran, dan diharapkan akan menerima manfaat dari program kebijaksanaan. Menurut George C. Edwards, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu;

- a. Komunikasi, keberhasilan implementasi kebijakan masyarakat agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui

sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

- b. Sumber Daya, walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berupa sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor dan sumber daya finansial.
- c. Disposisi, merupakan watak dan karakteristik yang dimiliki oleh

implementor, seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis.

- d. Struktur organisasi, merupakan yang bertugas mengimplementasikan kebijakan, memiliki pengetahuan yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Tahapan ini tentu saja melibatkan seluruh stakeholder (pemangku kepentingan) yang ada. Baik sektor swasta maupun publik secara kelompok maupun individual (Pramono, 2020).

Artikel ini bertujuan untuk meninjau faktor-faktor penyebab keberhasilan kebijakan pendidikan pada kondisi VUCA di masa pandemi dengan menganalisis teori implementasi.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan analisis dokumen catatan harian Covid – 19 yang dimuat <https://amcnews.co.id/> yang tercatat mulai dari Maret 2020 hingga Januari 2022. Lokasi penelitian dalam kasus artikel ini yaitu di Kabupaten Agam.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan Kebijakan Pendidikan di Kabupaten Agam Selama Pandemi Covid 19 antara lain :

1) Komunikasi

Kebijakan Pendidikan merupakan salah satu kebijakan yang penting dan menjadi perhatian pemerintah selama pandemi Covid - 19. Kebijakan Pendidikan tidak hanya dinaungi oleh satu aktor pemerintah daerah saja, namun lintas aktor pada multilevel pemerintahan pemerintah provinsi Sumatera Barat, dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten Agam juga menjadi *leading* sektor dan berperan dalam penanganan Covid - 19. Ulasan selanjutnya analisis kebijakan pendidikan yang dilakukan di Kabupaten Agam saat pandemi Covid - 19, sebagai berikut:

1) Kebijakan pembelajaran daring

Pemberlakuan kebijakan belajar daring (pembelajaran di rumah) diambil oleh Bupati Agam mengingat kondisi Covid - 19 yang terus berlanjut dan kebijakan ini menindaklanjuti surat edaran Menteri tentang pembelajaran pada masa pandemic yang telah dimulai dari 2 Maret hingga 2 April 2020. Namun, perpanjangan ini tak kunjung usai dari 3 maret hingga 16 april dan disambung kembali 17 april

hingga 30 April 2020. Kondisi ini menandakan keadaan saat itu tidak baik-baik saja, sehingga pemerintah terpaksa mengeluarkan kebijakan tersebut. Perpanjangan ini dilakukan sebagai tanggapan atas Instruksi Bupati Agam Nomor: 421/2445/Disdikbud/2020, yang mengatur perpanjangan waktu pelaksanaan kegiatan belajar di rumah dan kegiatan ibadah Ramadhan.

Bentuk pembelajaran bagi siswa yang tidak memiliki jaringan internet dilakukan seperti biasa secara tatap muka, seperti orang tua kepada guru di rumah atau di sekolah. Jadwal penyeteroran tugas dilakukan sekali dalam 3 hari dan minimal sekali dalam seminggu. Selama pembelajaran daring guru tetap memantau siswa belajar di rumah. Perpanjangan kebijakan juga dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Agam hingga 16 Mei 2020 dan sekolah kembali 2 Juni 2020 hingga proses penerimaan mahasiswa baru. Kebijakan ini didasarkan pada Instruksi Bupati Agam Nomor: 421/2183/Disdikbud/2020, yang memperpanjang waktu pelaksanaan pendidikan dan ibadah Ramadhan di rumah. Waktu ini bertepatan dengan waktu bulan Ramadhan, sehingga siswa diharapkan dapat me-

lakukan kegiatan keagamaan dan pendidikan karakter secara *online*, antara lain: membaca Al Quran, tadarus, tarawih di rumah masing-masing, dan mendengar tausiyah di TV dan media elektronik.

Proses pembelajaran daring ini berlaku bagi siswa TK, SD, dan SMP diperpanjang kembali seharusnya berakhir di 30 Mei 2020 diperpanjang mulai dari 22 Juni hingga 11 Juli 2020. Sekolah dimulai pada tanggal 13 Juli 2020. Surat instruksi Bupati Agam Nomor 421/2697/Disdikbud/2020 tentang perpanjangan waktu pelaksanaan kegiatan belajar di rumah di masa Covid – 19 menjelaskan waktu belajar di rumah tersebut. Di dalam surat ini juga dianjurkan agar melakukan protokol kesehatan dan menjaga jarak, serta tetap berada di rumah. Pada situasi new normal. Pemerintah mulai melakukan pembelajaran tatap muka terbatas.

2) Pembelajaran Tatap Muka Terbatas

Proses Belajar Mengajar(PBM) tatap muka tahun ajaran baru yang seharusnya dimulai pada 13 Juli 2020 mendatang telah ditunda oleh pemerintah Kabupaten Agam. Kondisi yang tidak memungkinkan membuat pemerintah melakukan pengambilan

keputusan bahwa pembelajaran tetap dilakukan 2 metode yaitu dalam jaringan (guru online dan pembelajaran online) dan luar jaringan (tatap muka) bagi siswa yang tidak memiliki jaringan online, android dan guru yang kurang berpengalaman. Bentuk tugas diberikan kepada anak-anak yaitu Kumpulan pekerjaan mereka, selain itu dapat menyaksikan pembelajaran di TVRI. Orang tua dan tokoh masyarakat juga diminta untuk mematuhi protokol kesehatan.

Pemerintah berencana melakukan pembelajaran tatap muka di Kabupaten Agam dengan perkiraan 90% sekolah pada bulan Agustus 2020 dengan memperhatikan kesiapan sarana dan prasarana berstandar dan sesuai dengan protokol kesehatan. Informasi ini berdasarkan info awal dari Tim GTP2 Covid - 19 Kabupaten Agam. Dasarnya adalah surat keputusan bersama 4 Menteri Nomor 01/KN/2020, 516 TAHUN 2020, 0.01/Menkes/363/2020 dan 440-882 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada tahun Ajaran 2020/2021 dan tahun akademik 2020/2021 di masa pandemic Covid - 19.

Beberapa metode dikembangkan yaitu kegiatan sekolah tanpa jam istirahat, sekolah dibagi 2 *shift* dengan

durasi pembelajaran sebanyak 4 jam. Pemerintah mengadakan simulasi selama 10 hari sebelum pemberlakuan untuk secara tetap kebijakan tersebut. Untuk memastikan kebijakan ini tepat dilakukan pemeriksaan di sekolah-sekolah SMP dan SMA sederajat diseluruh kecamatan, pondok pesantren. Beberapa standar yang ditetapkan untuk kesiapan sekolah:

- a. Tempat pencuci tangan di setiap gerbang dan area sekolah disertai sabun dan tisu.
- b. Menyediakan termogun untuk pengecekan suhu dan masker
- c. Guru mengajar menggunakan face shield
- d. Kantin ditutup.

Pemantauan kebijakan dilakukan oleh 4 tim yang telah dibentuk dan agar melakukan monitoring di lapangan selama 4 hari (20-23 Juli 2020) di 16 Kecamatan antara lain:

- a. Tim 1 dipimpin oleh Bupati Agam
- b. Tim 2 dipimpin oleh Wakil Bupati Agam
- c. Tim 3 dipimpin oleh Sekretaris Daerah
- d. Tim 4 dipimpin oleh Ketua DPRD Agam.

Pembelajaran tatap muka di sekolah dapat diberlakukan jika sarana yang tersedia sudah sesuai

dengan 15 orang per lokal, menghimbau agar siswa setelah pulang sekolah langsung ke rumah. Selain itu, majelis guru diharapkan siap dalam 2 hal yaitu protokol kesehatan dan mekanisme PBM.

3) ASN Peduli Kabupaten Agam

Selain permasalahan Pendidikan, ASN dibawah naungan Dinas Pendidikan Kabupaten Agam melakukan penggalangan dana sejumlah Rp244.500.000,- dan telah diserahkan ke tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID – 19 Kabupaten Agam. Aparatur Sipil Negara (ASN) di bawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Agam mengumpulkan donasi untuk membantu menangani pandemi Covid - 19. Donasi tambahan sebesar Rp 244 juta diserahkan ke Tim GTP2 Covid – 19 Kabupaten Agam. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Agam menyerahkan bantuan kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Agam, Sekretaris Daerah Kabupaten Agam, serta Ketua Gugus Tugas Covid – 19 Kabupaten Agam, di Posko Gugus Tugas COVID 19. ASN Peduli terdiri dari semua guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, penilik, dan staf TK, SD, dan SMP di Kabupaten Agam, serta karyawan Dinas

Pendidikan Kabupaten Agam. Selain itu, juga memberikan 1200 lembar kepada seluruh Panti Asuhan di Kabupaten Agam. Bantuan tersebut dialokasikan terhadap alat Pelindung Diri (APD), bahan-bahan pangan, masker, *hand sanitizer*, disinfektan, dan alat-alat lainnya.

4) Layanan Administrasi Digital

Layanan administrasi berbasis digital dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Agam dengan bentuk inovasi administrasi keuangan dan administrasi kepegawaian. Aktivitas ini dilakukan dengan Surat edaran bernomor 4 21/2919/Disdikbud-2020 membahas bagaimana teknologi informasi dan komunikasi dapat digunakan dalam pelayanan pendidikan. Keberadaan inovasi ini selama pandemic dapat mengatasi masalah pembatasan kunjungan langsung ke Dinas. Pelayanan bisa dilakukan dengan melengkapi bahan melalui format Pdf yang telah ditetapkan dan dikirimkan ke pengelola dan penanggung jawab *email* dan *WhatsApp*.

5) Pelatihan pembelajaran bagi guru PAUD

Pembelajaran daring merupakan kebijakan yang dipilih pemerintah dalam menghadapi Covid – 19 di

semua jenjang Pendidikan. Dasarnya adalah surat keputusan bersama 4 Menteri Nomor 01/KN/2020, 516 TAHUN 2020, 0.01/Menkes/363/2020 dan 440-882 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada tahun Ajaran 2020/2021 dan tahun akademik 2020/2021 di masa pandemic COVID 19. Salah satu jenjang Pendidikan terendah adalah PAUD. Walaupun kondisi pandemic hak anak didik PAUD juga harus diperhatikan. Penyelenggaraan PAUD kita disesuaikan dengan Surat Edaran Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Belajar Dari Rumah (BDR) Dalam Masa Darurat Penyebaran COVID - 19 yang dikeluarkan Dirjen PAUD, SD, dan SMP. Metode dan media pelaksanaan BDR, dilaksanakan dengan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) yang dibagi ke dalam dua pendekatan yaitu pembelajaran jarak jauh dalam jaringan (daring) dan luar jaringan (luring).

Balai Pengembangan PAUD Sumbar di Pariaman memberikan pelatihan kepada 12 orang Guru PAUD di Kabupaten Agam dan dilakukan 2 periode Angkatan. Angkatan pertama 15-20 Juni 2020 sebanyak 7 orang. Angkatan kedua

22-27 Juni 2020 sebanyak 5 orang. Pelatihan terdiri dari 15 materi yaitu bermain bagi anak, seperti bermain sains dari rumah, bermain matematika dari rumah, bermain bahasa dari rumah, bermain musik dari rumah, dan bermain seni dari rumah. Diharapkan para guru yang pelatihan ini memberikan informasi dan berbagi ilmu bagi guru lain di Kabupaten Agam.

6. Koordinasi Provinsi Sumatera Barat terkait kesiapan sekolah tatap muka

Pada 4 Januari 2021 Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Agam menyatakan bahwa satuan pendidikan mulai dari tingkat PAUD, SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA telah memulai pembelajaran secara tatap. Pembelajaran tatap muka diberlakukan sebagai salah satu bentuk tindak lanjut dari Instruksi Bupati setelah mengikuti rapat bersama Satuan Tugas Penanganan COVID 19, OPD terkait, Kemenag dan Kacabdin Pendidikan Sumbar Wilayah 1 sesuai instruksi Bupati Agam Nomor 421/5461/Disdikbud/2020 tentang sekolah tatap muka yang diberlakukan. Setiap Tim beranggotakan 7 - 8 orang yang terdiri dari Staf Ahli Bupati, Asisten, Kepala OPD, Kakan Kemenag dan Jajaran, serta

Kacabdin Wilayah I Disdik Sumbar serta Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah.

Dari berbagai uraian kebijakan diatas dapat dilihat komunikasi kebijakan dilakukan melalui beberapa hal :

- a. Dikeluarkannya peraturan pemerintah mulai dari SK Menteri hingga instruksi Bupati/surat edaran OPD Dinas Pendidikan.
- b. Penggunaan *flatfrom online* dalam pelayanan atau pun sosialisasi kebijakan. Sarana komunikasi dominan yang digunakan *Whats App* grup satgas untuk keanggotaan Satgas dan WA yang ditetapkan untuk layanan administrasi Dinas Pendidikan.
- c. Komunikasi langsung melalui kegiatan monitoring kebijakan dengan pembentukan 4 tim khusus yang telah ditunjuk.
- d. Komunikasi langsung antara peserta didik dan orang tua khusus daerah yang terbatas dan terkendala jaringan.

2.2.1. Sumberdaya

Kebijakan yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan sebagai upaya penanganan Covid - 19 di Kabupaten Agam antara lain: sekolah daring, pemberlakuan sekolah tatap muka

terbatas, pelayanan administrasi melalui *WhatsApp* yang ditetapkan dinas, kebijakan pemberian bantuan donasi guru, dan kebijakan peningkatan kapasitas pelatihan guru PAUD. Dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan melibatkan berbagai aktor yaitu:

- a. Dinas Pendidikan Kabupaten Agam sebagai *leading* sektor yang membawahi semua sekolah PAUD/TK, SD, dan SMP di Kabupaten Agam.
- b. Kementerian Agama Kabupaten Agam menaungi sekolah Agama mulai dari RA, MI, MTs, dan MA termasuk sekolah pesantren.
- c. Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat menaungi SMA/SMK seluruh Kabupaten Agam

Tim GTP2 Covid – 19 Kabupaten Agam terbagi dalam 4 kelompok kecil mengawasi setiap pemberlakuan kebijakan pendidikan di Kabupaten Agam. Hasil pemantauan 4 tim GTP2 COVID - 19 Kabupaten Agam menjadi dasar pertimbangan apakah kebijakan yang akan diberlakukan bisa dilakukan atau tidak, seperti: saat pemerintah pemberlakuan pembelajaran terbatas tatap muka. Tim monitoring memantau terlebih dahulu kesiapan sekolah setiap jenjang pendidikan. Hasil pantau di lapangan dilaporkan kepada kepala daerah

sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

Sumber dana utama dari program penanganan Covid – 19 sektor pendidikan dibiayai oleh APBD Kabupaten Agam. Hal yang menarik juga dalam rangka percepatan penanganan akibat Covid – 19 tidak hanya dalam bentuk proses implementasi kebijakan pendidikan semata, namun kegiatan informal dalam rangka solidaritas organisasi profesi KORPRI terutama guru-guru bekerjasama dengan Tim GTP2 menggalang dana bantuan untuk masyarakat. Dana yang terkumpul didistribusikan dalam berbagai bantuan bersama-sama pemerintah.

2.3. Komitmen, Kejujuran, dan Sifat Demokratis

Implementor yang tergabung dalam Tim GTP2 Covid – 19 Kabupaten Agam selalu demokratis dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan di lapangan. Terkadang kebijakan dan sikap diambil implementor tergantung pada situasi dan perkembangan kondisi di lapangan. Selain itu, juga diberikan keleluasaan kepada sasaran kebijakan tertentu seperti pesantren dalam merupakan pola penanganan Covid-19 di lingkungan pesantren.

Jaringan Tim GTP2 Covid - 19 Kabupaten Agam berkoordinasi intens dengan Dinas Pendidikan dan Kanwil KEMENAG Kabupaten Agam untuk mengetahui pergerakan sekolah di bawah naungannya. Pada masa Covid - 19, pondok pesantren menjadi *cluster* yang sangat mudah terpapar karena pola *boarding school* yang diterapkan. Kementerian Agama memberikan batasan aturan dan keleluasaan aturan dalam menjalankan pendidikan pesantren dengan batasan pemberlakuan protokol kesehatan yang ketat. Setiap pesantren membuat jaringan Satgas Covid - 19 di Pesantren sebagai aktor yang berkoordinasi dengan pemerintah dalam berbagai proses penanganan.

Berbagai program pemerintah dijalankan di sekolah seperti: edukasi terkait Covid – 19 dan program vaksinasi. Jaringan pemerintah bekerjasama dengan sekolah, Kanwil KEMENAG Kabupaten Agam, pesantren, dan Dinas Pendidikan Provinsi agar dapat mengajak siswa mensukseskan program vaksin pemerintah. Dalam hasil penelitian ini ditemukan sikap kooperatif dari pihak sekolah dan pesantren (Pondok Pesantren Parabek) dalam bentuk fasilitasi kegiatan

vaksin yang dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Agam.

2.4. Struktur organisasi

Jaringan kebijakan pendidikan lebih dominan adalah sekolah-sekolah yang berada di lingkungan Kabupaten Agam yang menjadi sasaran kebijakan. Pemerintah tidak dapat langsung menerapkan aturan kepada siswa sekolah, namun harus melalui aktor-aktor penanggung jawab di daerah, seperti dalam gambar 1 berikut ini :



Gambar 1. Struktur Jaringan Kebijakan Dinas Pendidikan Kabupaten Agam

Gambar 1 ini menegaskan bahwa pemberlakuan dan pengawasan kebijakan pendidikan dilakukan secara bertingkat sesuai dengan organisasi perantara dan bertanggung jawab dengan sekolah-sekolah di Kabupaten

Agam, seperti: Dinas Pendidikan, Kanwil Kemenag Kabupaten Agam, dan Cabang Dinas Pendidikan Sumbar Wilayah I. Semua elemen aktor yang terlibat berkoordinasi dalam menjalankan kebijakan dan mematuhi segala Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan.

D. Kesimpulan

Uraian tentang kebijakan pendidikan di Kabupaten Agam pada masa pandemi dapat disimpulkan bahwa 4 faktor sebagai berikut : a) Pola komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah sangat tepat dengan mempertimbangkan jenis kebijakan, literasi kelompok sasaran, dan media sederhana penunjang kegiatan komunikasi; b) Sumberdaya kebijakan sangat memadai ditandai dengan ketersediaan anggaran dan tim khusus Satgas sebagai sumberdaya manusia yang menjalankan kebijakan; c) Sikap demokratis dan kejujuran implementor juga sangat berpengaruh seperti : pengambilan keputusan berdasarkan kondisi di lapangan dan melibatkan multi pihak; d) Struktur birokrasi antara berbagai pihak penyelenggara kebijakan yang berada pada multilevel pemerintahan terkoordinasi dan selalu bekerjasama.

Buku :

Abidin, S. Z. (2019). *Kebijakan Publik*. Salemba Humanika.

Anggara, S. (2018). *Kebijakan Publik (Pengantar)* (2nd ed.). CV.PUSTAKA SETIA.

Djaja, D. K. et al. (2025). *Kebijakan Publik: Teori Dan Kasus* (D. K. dan S. M. Djaja, Ed.; 1st ed.). CV. Mega Press Nusantara.

Prayogi et al. (2025). Transformasi Pendidikan di Indonesia : Adaptasi Pembelajaran di Era Pandemi COVID 19. *COGNITIVISM (Educational Research and Develeopment)*, 1, 101–109. <https://doi.org/10.54373/cognitiv.v1i2.115>

Jurnal :

Alvin Habibi, T., Trunojoyo, J., Sumenep, K., & Timur, J. (2025). Dampak Pembelajaran Daring terhadap Perkembangan Peserta Didik Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, 3(1), 347–359. <https://doi.org/10.61722/jipm.v3i.717>

Maulidiyah, A. N., Masruroh, I., & Anshori, M. I. (2025). Kepemimpinan Agile Dalam Menghadapi Tantangan VUCA di Era Digital. *Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, 5(2), 92–106. <https://doi.org/10.56910/gemilang.v5i2.1963>

Muddin, S., Islam Negeri Alauddin Makassar, U., & Selatan, S. (2025). Analisis Kebijakan Pendidikan Di Era Pandemi. *AT-TAKLIM: Jurnal Pendidikan Multidisplin*, 2, 104–115. <https://journal.hasbaedukasi.co.id/index.php/at-taklimHalaman:104-115>

Nurkamiden, U. D. (2021). Kebijakan Pendidikan Di Indonesia Era Pandemi Covid-19. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 9, 164–169.

Sumber lain :

<https://amcnews.co.id/>. Mengolah sumber catatan harian bulan Maret 2020 hingga Januari 2022 terkhusus laman pemberitaan yang memuat kebijakan pendidikan di era pandemi. Adapun sumber tersebut :

AMCNews.co.id. (2020a). *agustus-sekolah-di-agam-bisa-belajar-tatap-muka-ini-syaratnya/*. <http://amcnews.co.id/2020/07/16/agustus-sekolah-di-agam-bisa-belajar-tatap-muka-ini-syaratnya/>

AMCNews.co.id. (2020b). *asn-peduli-serahkan-bantuan-rp244-juta-untuk-penanganan-covid-19-di-agam/*. <https://amcnews.co.id/2020/04/22/asn-peduli-serahkan-bantuan-rp244-juta-untuk-penanganan-covid-19-di-agam/>

AMCNews.co.id. (2020c). *belajar-dari-rumah-pemenuhan-hak-pendidikan-anak-usia-dini-selama-pandemi-covid-19/*.

- AMCNews.co.id. (2020d). *cek-kesiapan-sekolah-bupati-agam-pbm-tatap-muka-kombinasi-daring-dan-luring/*.
<http://amcnews.co.id/2020/07/21/cek-kesiapan-sekolah-bupati-agam-pbm-tatap-muka-kombinasi-daring-dan-luring/>
- AMCNews.co.id. (2020e). *disdikbud-agam-siapkan-skenario-hadapi-new-normal/*.
<http://amcnews.co.id/2020/06/03/disdikbud-agam-siapkan-skenario-hadapi-new-normal/>
- AMCNews.co.id. (2020f). *hari-kedua-monitoring-sekda-agam-cek-kesiapan-sekolah-di-kecamatan-tanjung-mutiara/*.
<http://amcnews.co.id/2020/07/21/hari-kedua-monitoring-sekda-agam-cek-kesiapan-sekolah-di-kecamatan-tanjung-mutiara/>
- AMCNews.co.id. (2020g). *pbm-tatap-muka-di-agam-ditunda-belajar-masih-melalui-daring-dan-luring/*.
<http://amcnews.co.id/2020/07/09/pbm-tatap-muka-di-agam-ditunda-belajar-masih-melalui-daring-dan-luring/>
- AMCNews.co.id. (2020h). *pbm-tatap-muka-guru-dianjurkan-gunakan-face-shield-saat-mengajar/*.
- AMCNews.co.id. (2020i). *pelayanan-di-disdikbud-agam-manfaatkan-teknologi-informasi-dan-komunikasi/*.
<http://amcnews.co.id/2020/06/22/pelayanan-di-disdikbud-agam-manfaatkan-teknologi-informasi-dan-komunikasi/>
- AMCNews.co.id. (2020j). *pemkab-agam-kembali-perpanjang-masa-belajar-di-rumah-hingga-16-mei/*.
<http://amcnews.co.id/2020/05/01/pemkab-agam-kembali-perpanjang-masa-belajar-di-rumah-hingga-16-mei/>
- AMCNews.co.id. (2020k). *pemkab-agam-kembali-perpanjang-masa-belajar-di-rumah-hingga-20-juni/*.
<http://amcnews.co.id/2020/06/01/pemkab-agam-kembali-perpanjang-masa-belajar-di-rumah-hingga-20-juni/>
- AMCNews.co.id. (2020l). *pemkab-agam-perpanjang-masa-belajar-dari-rumah-hingga-30-april/*.
<https://amcnews.co.id/2020/04/16/pemkab-agam-perpanjang-masa-belajar-dari-rumah-hingga-30-april/>
- AMCNews.co.id. (2020m). *rencana-pbm-tatap-muka-sekda-agam-cek-kesiapan-sekolah/*.
<http://amcnews.co.id/2020/07/20/rencana-pbm-tatap-muka-sekda-agam-cek-kesiapan-sekolah/>
- AMCNews.co.id. (2020n). *tinjau-kesiapan-sekolah-di-malalak-wabup-agam-minta-guru-lebih-nyinyir/*.
<http://amcnews.co.id/2020/07/21/tinjau-kesiapan-sekolah-di-malalak-wabup-agam-minta-guru-lebih-nyinyir/>

malalak-wabup-agam-minta-
guru-lebih-nyinyir/

AMCNews.co.id. (2020o). *wabup-
agam-ajak-warga-sekolah-dan-
orangtua-murid-bangun-
kebiasaan-baru/*.

[http://amcnews.co.id/2020/07/20
/wabup-agam-ajak-warga-
sekolah-dan-orangtua-murid-
bangun-kebiasaan-baru/](http://amcnews.co.id/2020/07/20/wabup-agam-ajak-warga-sekolah-dan-orangtua-murid-bangun-kebiasaan-baru/)

AMCNews.co.id. (2020p). *wabup-
agam-cek-kesiapan-sekolah-di-
iv-koto-laksanakan-pbm-tatap-
muka/*.

[http://amcnews.co.id/2020/07/20
/wabup-agam-cek-kesiapan-
sekolah-di-iv-koto-laksanakan-
pbm-tatap-muka/](http://amcnews.co.id/2020/07/20/wabup-agam-cek-kesiapan-sekolah-di-iv-koto-laksanakan-pbm-tatap-muka/)

AMCNews.co.id. (2021). *cek-
penerapan-prokes-pemkab-
agam-monitoring-pelaksanaan-
sekolah-tatap-muka*.